



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026.

RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun dan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga

terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige,

2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA



dr. JULIWAN HUTAPEA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197107012001121001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i-ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TU JUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.3. Program dan kegiatan.....	49

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	55
BAB VI	PENUTUP	58

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba merupakan rencana kerja awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yang memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2026 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 dan sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2026 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Toba Tahun 2026. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba juga diselaraskan dengan rancangan Rencana Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026, serta Rencana Kerja

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 didahului dengan penyusunan Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tahun 2026 yang merupakan sumber usulan secara *top down*. Oleh karena itu, secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 mengintegrasikan program-program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini akan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui Rencana Kerja, setiap SKPD akan mampu merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dengan matang.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Toba yaitu “TOBA MANTAP 2029”, “Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya” seperti tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026 – 2029. Inilah yang menjadi arah / tujuan pembangunan Kabupaten Toba sampai dengan tahun 2029 yang dinyatakan dengan Misi, tujuan dan sasaran seperti dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2025 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah :
 - 1) Sebagai acuan dan gambaran tentang pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam bentuk susunan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
 - 2) Sebagai alat ukur Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026.
- b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026.
 - 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Tahun 2026.
 - 3) Untuk menjabarkan visi dan misi Kabupaten Toba 2025 – 2029 dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.
 - 4) Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan (Outline) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba ini adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.4. Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

BAB V

PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba (DPPKB) untuk tahun 2024 sebesar Rp. 11.080.132.212 dengan besaran pagu tersebut ada 4 (empat) Program, 13 (tigabelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Dibawah ini disajikan data mengenai Realisasi Program/Kegiatan selama tahun 2024.

A. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Memiliki 4 kegiatan dengan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp., 5.196.222.179 dan realisasi sebesar Rp. 4.868.706.208,- (93.70%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Memiliki 5 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Promosi Dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronikserta Media Luar Ruang Indikator Kinerjanya adalah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana dengan target sebanyak 16 dokumen dan realisasi target kinerjanya adalah 16 dokumen (100%) dengan besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 150.000.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 126.889.202 (84,59%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Indikator Kinerjanya adalah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dengan target sebanyak 16 laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 1 laporan (100%) kecamatan serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 841.600.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 790.396.000 (93,92%).

- Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Indikator Kinerjanya adalah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK dengan target sebanyak 1 Laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 1 Laporan (100%) serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 140.000.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 120.666.634 (86,19%).

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)

Indikator Kinerjanya adalah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target sebanyak 16 Laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 16 Laporan (100%) serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp.352.800.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 350.168.000 (99,25%).

- Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Indikator Kinerjanya adalah Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan

Unmeet Need dengan target sebanyak 1 Laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 1 Laporan (100%) serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 137.200.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 112.733.000 (82,17%).

b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Memiliki 1 sub kegiatan

- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah Kader mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan dengan target kinerjanya adalah 100 orang dan realisasinya adalah 976 orang sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 962.580.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 944.933.600 (98,17%)

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan

Memiliki 2 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Indikator Kinerja adalah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dengan target kinerjanya adalah 1 laporan dan realisasinya adalah 1 laporan (100%) , sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 42.750.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 36.750.000 (85,96%).

- Sub Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator Kinerjanya Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), dengan target kinerjanya 150 orang dan realisasinya adalah 150

orang (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 2.291.389.679 dengan realisasi sebesar Rp. 2.139.642.272 (93,38%)

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Target kinerja 3 organisasi dan realisasinya adalah 3 organisasi (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 68.652.500 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 68.590.500 (99,91%)
- Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB. Target kinerja 1 Dokumen dan realisasinya adalah 1 (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 3.750.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pihak BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini membutuhkan Narasumber/fasilitator sebagai pemateri dalam kegiatan, namun karena terbatasnya anggaran yang diberikan, honorarium untuk narasumber/fasilitator tidak dapat dianggarkan dan kegiatan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Target indikator kinerjanya adalah 17 Kampung dan realisasinya adalah 17 Kampung, sedangkan anggarannya adalah Rp. 205.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 177.937.000 (86,59%)

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Memiliki 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.956.696.380,- dan realisasi sebesar Rp. 1.548.124.748 (79,12%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Target kinerjanya adalah 25 Unit dan realisasinya adalah 25 unit (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 300.000.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 234.900.000 (78,30%)

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target kinerjanya adalah 1 Laporan dan realisasinya adalah 1 Laporan (96,83%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 62.496.380 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 47.553.200 (76,09%)

- Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan target kinerjanya adalah 1 Laporan dan realisasinya sebanyak 1 laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 19.200.000 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 15.084.000 (78,56%).

b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) dengan target kinerjanya adalah 16 Laporan dan realisasinya sebanyak 16 laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 750.000.000 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 594.545.798 (79,27%).
- Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) dengan target kinerjanya adalah 16 Laporan dan realisasinya sebanyak 16 laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 825.000.000 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 656.041.750 (79,52%).

3. Program Pengendalian Penduduk

Memiliki 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 389.052.500,- dan realisasi sebesar Rp. 328.281.478 (84,38%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 2 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Target kinerjanya sebanyak 12 laporan dan realisasinya sebanyak 12 laporan (100%), sedangkan anggarannya

sebesar Rp. 176.400.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 144.000.000 (81,63%).

- Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Target kinerjanya sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya sebanyak 1 Dokumen (100%), sedangkan anggarannya sebesar Rp. 212.652.500 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 184.281.478 (86,66%).

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 6 kegiatan dengan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.538.161.153 dan realisasi sebesar Rp. 3.341.629.120 (94,45%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memiliki 1 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerjanya adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen dan realisasinya adalah 6 dokumen (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 12.861.612 dan realisasi adalah sebesar Rp. 12.324.812 (95,83%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Memiliki 1 sub kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan ini dengan target kinerja 30 Orang/ bulan realisasi kinerja 26 Orang capaian kinerja 86,7% dengan pagu anggaran Rp. 2.749.611.800 realisasi keuangan Rp. 2.638.452.193 (95,96%)

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Memiliki 5 sub kegiatan

- Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor dengan target 1 paket dan realisasinya 1 paket (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 114.951.321 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 114.921.101 (99,97%)

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerjanya adalah sebanyak 1 paket dan realisasi sebanyak 1 paket (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.440 dan realisasi adalah sebesar Rp. 4.999.440 (100%)

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerjanya adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target sebanyak 1 paket dan realisasi sebanyak 1 paket (100%) dengan anggarannya sebesar Rp.600.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp.600.000 (100%).

- Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerjanya adalah sebanyak 16 laporan dan realisasi sebanyak 12 laporan (75%) dengan anggaran sebesar Rp. 172.064.000 dan realisasi adalah sebesar Rp. 170.520.613 (99,10%)

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya dengan target 1 unit dan realisasinya sebanyak 1 unit (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 48.216.180 dan realisasinya sebesar Rp. 45.995.200 (95,39%).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerjanya adalah Penyediaan rekening listrik, telepon, internet dan air dengan target 1

i sebanyak 1 Laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 6.800.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 3.831.756 (56,35%) karena pada saat perencanaan anggaran harga untuk biaya listrik yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000 sedangkan pemakaian pada tahun berjalan lebih kecil dari harga yang telah direncanakan.

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator kinerjanya adalah sebanyak 1 laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 201.940.000 dan realisasi adalah sebesar Rp. 146.110.000 (72,35%)

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerjanya adalah Perpanjangan dan Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 sebanyak 52 unit dan realisasi sebanyak 52 unit (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 207.900.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 184.828.189 (88,90%)

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerjanya adalah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 10 unit dan realisasinya adalah sebanyak 10 unit (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 18.216.800 dan realisasi sebesar Rp. 18.200.000

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Perencanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara keterpaduan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) guna melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah. Kegiatan yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 ini telah sesuai dengan Target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja. Namun, jika dilihat dalam pelaksanaannya, target kinerja untuk setiap program tersebut tidak semuanya dapat dicapai dengan alasan masing-masing setiap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja sudah semua Indikator Program dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya ada beberapa indikator program yang capaiannya rendah atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang pertama adalah mengenai Indeks Ketahanan Keluarga dengan target satuan sebesar 0,65 dan realisasinya sebesar 0,50 hal ini disebabkan karena rendahnya Jumlah peserta KB aktif dan jumlah SLTP yang mendapatkan Pendidikan Kependudukan,

pada pelaksanaannya hanya ada 6 (enam) SLTP di Kabupaten Toba sedangkan untuk jumlah SLTP yang ada sebanyak 50 SLTP.

Permasalahan yang kedua adalah mengenai *Unmeetneed* (Pus ingin anak ditunda dan Pus tidak ingin anak lagi) capainnya sangat tinggi hal ini menggambarkan kemunduran bukan kemajuan, karna semakin tinggi capaian orang yang tidak ingin ber-KB berarti tidak mendukung program KB yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mengurangi maupun menyeimbangkan jumlah penduduk, tingginya *unmeetneed* ini dikarenakan persepsi masyarakat Kabupaten Toba masih memegang teguh tradisi bahwa anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan juga semboyan “Anakku do Hamoraon di Au” (Banyak Anak, banyak rezeki) disisi lain banyak masyarakat yang masih takut dengan efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan alat kontrasepsi.

Melalui permasalahan target yang belum dapat terealisasi dengan baik ini, ada beberapa solusi yang harus dilakukan yaitu Dinas PPKB kab. Toba harus gencar melakukan sosialisasi maupun penyuluhan melalui Program Bangga Kencana mengenai KB dan manfaatnya hal ini diharapkan dapat menaikkan jumlah peserta KB aktif dan bekerjasama dengan lintas sektor. Permasalahan terakhir adalah mengenai kinerja TPK yang rendah mengakibatkan realisasi rendah, solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membuat Surat Himbauan yang ditujukan langsung kepada TPK (Tim Pendamping Keluarga) untuk mendampingi KRS (Keluarga Risiko Stunting) serta memberikan penegasan kepada TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) tingkat kecamatan agar mendorong TPK dapat melakukan pekerjaannya dengan baik guna percepatan penurunan *Stunting*.

C. KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN YANG AKAN DILAKUKAN SELANJUTNYA

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini telah menyajikan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian target seperti telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 dan secara rinci telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba masih belum dapat memenuhi target kinerja seperti telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi Tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba masih tergolong rendah dalam pencapaian target, dibawah ini disajikan beberapa upaya perbaikan ke depannya terhadap sasaran yang tidak dapat mencapai target diantaranya adalah :

1. Melakukan Program Penyuluhan ke setiap kecamatan dengan mengundang lintas sektoral untuk mendiskusikan dan mencari solusi untuk menangani masalah yang terjadi di desa khususnya masalah mengenai Program KB dan *Stunting* smisalkan sanitasi yang buruk (Penyediaan air bersih) yang merupakan salah satu indikator *Stunting*, kemudian fasilitas sarana dan prasana untuk memudahkan masyarakat ber-KB.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB, karena Faktor meningkatnya *Unmeet Need* dipengaruhi oleh Aksesibilitas akan fasilitas kesehatan, Rantai Pasok Alokon (Alat Kontrasepsi) yang harus lancar, SDM (PKB/PLKB) yang harus *dipush* untuk gencar mempromosikan program KB dan manfaatnya bagi kehidupan dimasa mendatang kepada masyarakat. Hal tersebut juga akan mendorong pemakaian alat

kontrasepsi dengan metode jangka panjang (MKJP) yang aman dan sehat bagi masyarakat.

3. Pemanfaatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui media cetak seperti Spanduk, Brosur, *Leaflet*, dan Banner mengenai banyak hal tentang manfaat KB, Pencegahan *Stunting*, Bahaya menikah diusia dini bagi remaja dapat dituangkan melalui sosialisasi berbentuk media cetak yang dipasang di setiap kecamatan misalnya, kantor camata ataupun kantor desa/kelurahan serta di tempat yang padat penduduknya dan dapat dijangkau masyarakat.
4. Kegiatan sosialisasi yang intens mengenai masalah *Stunting* yang kemudian dikhususkan di desa yang masuk sebagai kategori kampung KB dengan mengundang ahli gizi ataupun fasilitator yang mumpuni di bidang kesehatan, kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanyakan masalah terkait *Stunting* ataupun KB.
5. Membuat kegiatan khusus antara Dinas PPKB, Lintas Sektorial bersama dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) misalnya diskusi terbuka yang dilakukan secara intens untuk mendiskusikan masalah *Stunting* dan solusi permasalahannya.

Melalui pembahasan mengenai Realisasi Program/Kegiatan, Faktor yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaannya dan penanggulangan yang akan dilakukan dikemudian hari harus mengacu pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang telah tersusun secara sistematis agar sesuai dengan kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba setiap tahun. Pengerjaan Program/Kegiatan ini juga berhubungan dengan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 diharapkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bekerja maksimal karena sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tersebut dapat dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang juga merupakan turunan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2025 – 2029 **“TOBA MANTAP 2029”, “Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**.

Jika dievaluasi, Pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tahun 2024 seperti telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 masih belum sempurna karena adanya sasaran dan indikator kinerja seperti yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dengan Bupati Toba tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba dan adanya pembatasan refocusing anggaran.

Untuk mencapai target kinerja seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut diperlukan program dan kegiatan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 berjalan sesuai dengan yang

tertera dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 seperti berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Toba

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan(output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8 (7/6)			9	10=(5+7+9)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB														
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
						Indeks Ketahanan Keluarga	0,68	7.162.141.799,00	0,48	6.061.845.137,00	0,65	11.090.501.566,00	0,50	8.133.699.880,00	0,769230769	0,73393333	0,66	1,71	2,519696074
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun.	3,55	212.713.594,00	0,60	55.558.420,00	3,58	111.700.000,00	12,96	96.522.551,00	3,62	0,864123107	3,57	17,13	4,83
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	29,00	212.713.594,00	33,33	55.558.420,00	26,00	111.700.000,00	362,05	96.522.551,00	13,93	0,864123107	26,00	421,38	14,53
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KBKBP di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	35,00	54.697.781,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17,00	17,00	0,49
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					1,00	111.700.000,00	56,70	96.522.551,00	56,70	0,864123107	1,00	57,70	0,00
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1,00	97.240.500,00	2,00	55.558.420,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	3,00	3,00
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1,00	60.775.313,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1,00	1,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	100,00	2.431.706.245,00	7,00	2.676.362.000,00	11,90	3.893.605.000,00	23,88	3.759.586.050,00	2,01	0,965579726	11,90	42,78	0,43
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmet need	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)	495.264.000,00	16,00	92.699.191,00	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	960.820.000,00	14,81	402.909.600,00	0,00	0,419339314	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	0,00	0,00
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBKBP	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16,00	141.804.000,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,00	16,00	1,00
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KBKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	16,00	153.460.000,00	16,00	92.699.191,00	16,00	163.820.000,00	99,97	191.119.817,00	6,25	1,166645202	16,00	131,97	8,25
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16,00	200.000.000,00	0,00	0,00	16,00	797.000.000,00	105,02	1.111.669.196,00	6,56	1,394817059	16,00	121,02	7,56

2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	65,00	660.660.000,00	35,00	1.690.512.150,00	61,00	876.720.000,00	33,50	1.298.505.076,00	0,55	1,481094393	61,00	129,50	1,99
2	14	03	2,02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	90,00	292.215.000,00	65,00	526.912.150,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	66,00	0,73
2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100,00	368.445.000,00	75,00	1.163.600.000,00	976,00	876.720.000,00	2.048,03	1.298.505.076,00	2,10	1,481094393	976,00	3.099,03	30,99
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	85,00	1.095.782.245,00	46,40	512.360.089,00	70,00	1.932.995.000,00	89,42	1.854.797.874,00	1,28	0,959546131	70,00	205,82	2,42
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00	157.500.000,00	50,00	13.810.000,00	12,00	65.100.000,00	82,96	78.150.000,00	6,91	1,200460829	12,00	144,96	1,45
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80,00	377.852.245,00	76,00	473.129.599,00	11.057,00	1.867.895.000,00	11.057,00	1.776.647.874,00	1,00	0,951149756	11.057,00	22.190,00	277,38
2	14	03	2,03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	77,65	100.430.000,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.350,00	2.350,00	30,26
2	14	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1.500,00	220.000.000,00	1.000,00	25.420.490,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200,00	2.200,00	1,47
2	14	03	2,03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15,00	128.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00	20,00	1,33
2	14	03	2,03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4,00	112.000.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,00	4,00	1,00
2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mou/PKS yang ditandatangani unit kerja di DPPKB	10,00	180.000.000,00	5,00	380.790.570,00	5,00	123.070.000,00	5,00	203.373.500,00	1,00	1,652502641	5,00	15,00	1,50
2	14	03	2,04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	14,00	135.000.000,00	6,00	90.934.570,00	8,00	49.990.000,00	105,29	78.491.500,00	13,16	1,570144029	8,00	119,29	8,52
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB					17,00	73.080.000,00	98,46	71.958.000,00	5,79	0,984646962	17,00	115,46	0,00
2	14	03	2,04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	60,00	45.000.000,00	55,00	289.856.000,00	12,00	0,00	12,00	52.924.000,00	1,00	0	12,00	79,00	1,32

2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	28,90	714.755.000,00	9,17	662.188.501,00	29,05	3.840.804.833,00	18,02	2.231.261.622,00	0,62	0,580935955	12,00	39,19	1,36
2	14	04	2,01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	21,00	620.755.000,00	63,02	662.188.501,00	15,00	3.840.804.833,00	124,08	2.231.261.622,00	8,27	0,580935955	29,05	216,15	10,29
2	14	04	2,01	02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4,00	79.255.000,00	5,00	323.452.500,00	4,00	985.460.000,00	92,66	1.222.052.000,00	23,17	1,240082804	4,00	101,66	25,42
2	14	04	2,01	04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	384,00	182.000.000,00	200,00	68.656.001,00	384,00	825.000.000,00	39,77	328.141.750,00	0,10	0,397747576	384,00	623,77	1,62
2	14	04	2,01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	640,00	178.500.000,00	0,00	0,00	12,00	49.999.833,00	12,00	19.047.480,00	1,00	0,380950872	12,00	24,00	0,04
2	14	04	2,01	08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	130,00	181.000.000,00	105,00	270.080.000,00	12,00	1.980.345.000,00	105,83	662.020.392,00	8,82	0,334295485	12,00	222,83	1,71
2	14	04	2,02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri	68,00	94.000.000,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62,00	62,00	0,91
2	14	04	2,02	03		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35,00	94.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	63,57	1.249.537.779,00	3,18	0	20,00	83,57	2,39
2	14	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	3.802.966.960,00	51,90	2.667.736.216,00	100,00	3.244.391.733,00	38,31	2.046.329.657,00	0,38	0,630728292	100,00	190,21	1,90
2	14	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95,00	52.874.522,00	50,00	31.532.000,00	88,00	55.970.000,00	44,00	28.179.600,00	0,50	0,503476863	88,00	182,00	1,92

2	14	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	36.465.188,00	7,00	31.532.000,00	7,00	55.970.000,00	7,00	28.179.600,00	1,00	0,503476863	7,00	21,00	3,00
2	14	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	16.409.334,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,00	10,00	1,00
2	14	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN	100,00	2.804.149.303,00	50,00	2.078.632.412,00	100,00	2.520.931.000,00	100,00	1.652.555.183,00	1,00	0,655533683	100,00	250,00	2,50
2	14	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35,00	2.804.149.303,00	100,00	2.078.632.412,00	32,00	2.520.931.000,00	96,00	1.652.555.183,00	3,00	0,655533683	32,00	228,00	6,51
2	14	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	97,67	95.500.000,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,37	88,37	0,90
2	14	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1,00	0,03
2	14	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3,00	60.500.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,00	10,00	3,33
2	14	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pelayanan administrasi kantor	12,00	378.448.896,00	12,00	171.651.889,00	12,00	279.547.933,00	12,00	169.565.017,00	1,00	0,606568667	12,00	36,00	3,00
2	14	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30,00	3.622.209,00	20,00	2.202.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,00	24,00	0,80
2	14	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60,00	96.632.747,00	60,00	36.193.770,00	4,00	98.787.933,00	1,00	13.471.515,00	0,25	0,136368022	4,00	65,00	1,08
2	14	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10,00	24.698.115,00	10,00	4.929.510,00	4,00	4.466.100,00	1,00	36.193.770,00	0,25	8,104110969	4,00	15,00	1,50
2	14	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	756,00	32.818.669,00	166,00	8.295.000,00	12,00	19.086.500,00	3,00	4.929.510,00	0,25	0,258272077	12,00	181,00	0,24
2	14	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	25,00	8.916.382,00	10,00	13.687.277,00	4,00	592.400,00	0,00	0,00	0,00	0	4,00	14,00	0,56
2	14	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3,00	6.077.531,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13.687.277,00	0,00	0	4,00	4,00	1,33
2	14	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,00	205.683.243,00	120,00	106.344.332,00	4,00	156.615.000,00	4,00	153.759.502,00	1,00	0,981767404	4,00	128,00	0,85
2	14	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12,00	65.000.000,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00	12,00	1,00
2	14	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1,00	0,00

2	14	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	65.000.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	3,00	3,00	1,00	
2	14	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	12,00	202.584.536,00	12,00	184.064.610,00	12,00	180.090.000,00	12,00	114.984.254,00	1,00	0,63848217	12,00	36,00	3,00
2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	26.625.536,00	6,00	13.934.610,00	12,00	20.850.000,00	12,00	13.734.254,00	1,00	0,658717218	12,00	30,00	10,00
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21,00	175.959.000,00	17,00	170.130.000,00	12,00	159.240.000,00	12,00	101.250.000,00	1,00	0,635832705	100,00	129,00	6,14
2	14	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	204.409.703,00	100,00	201.855.305,00	100,00	207.852.800,00	37,50	81.045.603,00	0,38	0,389918264	100,00	237,50	2,38
2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55,00	186.266.246,00	50,00	180.009.305,00	63,00	189.636.000,00	63,00	81.045.603,00	1,00	0,427374565	63,00	176,00	3,20
2	14	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,00	18.143.457,00	10,00	21.846.000,00	10,00	18.216.800,00	0,00	0,00	0,00	0	10,00	20,00	2,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program							232,45	7.162.141.799,00	68,67	6.061.845.137	144,53	11.090.501.566	93,18	8.133.699.880,00	6,63	3,041	127,47	289,32	8,51

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba mempunyai tugas untuk:

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

- a. penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB dan kader KB;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan KB;
- k. pembudayaan dan pengembangan KB, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
- l. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- n. pembinaan dan pendayagunaan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tersebut di atas dijabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba merumuskan kebijakan dan strategi, yang dijabarkan

dalam penentuan program dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk tahun 2026, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 2.2. dalam lampiran.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021- 2026 telah mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan indikator, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

I. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk rata-rata per tahun dalam jangka waktu tertentu dan berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu, dengan penghitungan rumus sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Realisasi capaian realisasi laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Toba Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,60	0,01502	2,50

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKU adalah 0,0150284 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,60 persen maka capaiannya sebesar 2,50 persen, dengan demikian diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toba sudah melampaui target. Dengan demikian, maka tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Toba untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga yang berkualitas belum tercapai.

2. Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk

Capaian Kinerja untuk indikator Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	31,00 %	29,93 %	73,97%

Capaian Kinerja Indikator Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk Tahun 2023 ini adalah sebesar 29,93 % dari target kinerja sebesar 31,00% sehingga persentase capaian adalah sebesar 73,93%. Realisasi ini diperoleh dari perhitungan PPKBD, Sub PPKBD, TPK, UPPKS, BKB, BKR, BKL, PIK R, PUS, PKB, Honorer, Pegawai dan dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2024 dan dikali 100%.

3. (TFR) Total Fertility Rate

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-ta yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Realisasi capaian angka kelahiran total per WUS (25-49 tahun) untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi
TFR (Total Fertility Rate) Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Total Fertility Rate (TFR)	3,35	2,54	75,82

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKS adalah 2,54 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 3,35 maka capaiannya sebesar 75,82 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai TFR pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan remaja yang telah berhasil menurunkan ASFR 25-19 tahun dari 3,35/1000 kelahiran menjadi 2,54/1000 kelahiran dan meningkatkan median usia kawin pertama pada Tahun 2024 menjadi ≥ 20 tahun;
2. Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan fasilitas kesehatan melayani KB;
3. Meningkatkan upaya promosi dan KIE tentang isu kependudukan;

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi TFR sudah menunjukkan keberhasilan tahun 2024 mengalami kenaikan pencapaian di angka 2,54 persen dan 75,82 persen. Perbaikan yang dilakukan untuk tahun 2024 agar target capaian TFR sebesar 75,82 bisa tercapai dengan melakukan strategi yang inklusif dengan memadukan kebijakan penurunan TFR yang bersinergi dengan OPD terkait. Strategi yang terintegrasi akan dilakukan melalui penguatan kesinambungan program dan kerangka pendanaan melalui APBD.

4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) adalah persentase wanita yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Realisasi capaian Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan yang ingin ber-KB TidakTerpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	11,9	27	226,9

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 27 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 11,9 maka capaiannya adalah sebesar 226,9 persen hal ini menggambarkan pelayanan yang masih kurang optimal (*negative*).

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan *unmeet need* pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah frekuensi gerak per tahun per Kecamatan sebanyak 3 kaligerak pelayanan KB di wilayah DTP;
2. Mendayagunakan PPKBD/Sub PPKBD dan Kelompk KB untuk melakukan penyuluhan KIE di setiap Posyandu yang difaslitasi melalui anggaran DAK Non Fisik.

Agar target penurunan *unmeet need* di tahun 2023 semakin meningkat perlu dilakukan perbaikan yaitu dengan meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui advokasi terutama penggarapan program KB dan reproduksi serta peningkatan penggarapan wilayah DTPK melalui pelayanan bergerak untuk menjangkau PUS yang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan KB; mengadvokasi organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk mendorong Bidan menjadi jejaring fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; peningkatan kapasitas PKB dan IMP dalam memberikan KIE KB serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi terkait KB kepada masyarakat; dan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan motivator KB Pria dalam mendukung program KB dan kesehatan reproduksi.

5. **Persentase Peserta KB Aktif**

Persentase Peserta KB Aktif cakupan peserta KB Aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Realisasi capaian Peserta KB Aktif untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi
Peserta KB Aktif Tahun 2024**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Peserta KB Aktif	77,50	61,65	79,55

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 61,65 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 77,50 maka capaiannya adalah sebesar 79,55 persen.

6. **Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)**

Menurunkan angka kelahiran kelompok remaja atau dikenal dengan Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun itu cukup beralasan. Kehamilan remaja dan bayi tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayi. Akan tetapi akan memengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi
 Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn
 (ASFR 15-19 thn)
 Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	2,8	4,4	157

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 4,4 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,28 maka capaiannya adalah sebesar 157 persen hal ini juga menggambarkan hasil yang kurang optimal (negative).

7. Indeks Ketahanan Keluarga

Indeks Ketahanan Keluarga adalah indikator yang menunjukan kondisi dinamik keluarga dalam mengelola masalah uang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkelaitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan Nasional. Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi
 Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Keluarga	0,66	0,51	76,92

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 0,51 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,66 maka capaiannya adalah sebesar 76,92 persen.

8. **Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**

Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk mendukung target menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR), meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modren, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya layanan fasilitas kesehatan (Faskes). Realisasi capaian indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi
Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	92,30	92,30	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 92,30 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 92,30 maka capaiannya adalah sebesar 100 persen.

9. **Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap**

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, pelatihan program dan pelayanan kontrasepsi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan terutama yang memberikan layanan KB merupakan cara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap adalah sebagai berikut :

Perbandingan Target dan Realisasi

Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap Tahun
2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18,95	36,4	192

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 36,4 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 18,95 maka capaiannya adalah sebesar 192 persen hal ini masih tergolong rendah untuk capaian pelayanan MKJP.

10. **Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**

Keluarga para sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memnuhi keseluruhan.

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi
Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,05	36,46	125,5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 36,46 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 29,05 maka capaiannya adalah sebesar 125,5 persen.

11. Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB

Penyelenggaraan BKB merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina tumbuh kembang anak secara utuh dan optimal, melalui pemberian stimulasi fisik, kognitif, sosioemosional dan spritual guna mencapai indikator program KB, kader-kader dari kelompok peserta KB untuk membantu mensosialisasikan program-program kelompok kegiatan kegiatan khususnya kegiatan BKB. Kader Poktan adalah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta dan memiliki anggota keluarga usia balita.

Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	55,00	64,74	117,71

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 64,74 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 55,00 maka capaiannya adalah sebesar 117,71 persen.

12. Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB	55,00	49,30	89,64

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 49,30 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 55,00 maka capaiannya adalah sebesar 89,64 persen.

13. Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB

Tabel.13 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber-KB Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber-KB	44,00	34,44	78,27

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 34,44 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 44,00 maka capaiannya adalah sebesar 78,27 persen.

14. Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri

Tabel .14 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	62,00	54,9	88,55

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 54,9 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 62,00 maka capaiannya adalah sebesar 88,55 persen.

15. Persentase Kelompok PIK R/M

Tabel.15 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Kelompok PIK R/M Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kelompok PIK R/M	100	11, 07	11,07

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 11,07 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 100 maka capaiannya adalah sebesar 11,07 persen.

16. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Tabel. 16 Perbandingan Target dan Realisasi
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata Usia Kawin Pertama	24	≥23	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah ≥23 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 24.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indeks ketahanan keluarga keluarga berencana pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Memberikan penyuluhan materi 8 (delapan) fungsi keluarga pada kegiatan sosialisasi pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan Kelompok UPPKS);
- Melakukan penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan menggandeng mitra kerja (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Komite AIDS, PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kepala Desa, Koramil, Bidan Desa, Camat);
- Promosi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga melalui media cetak dan elektronik (iklan radio) dan memanfaatkan momentum

strategis seperti Hari Keluarga Nasional serta kegiatan lain yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja;

- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan peran aktif stakeholder dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) Program Bangga Kencana melalui berbagai media;
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja;
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- Meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana;
- Mengembangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (KASIH), yang berlokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. PPKS KASIH tersebut disediakan untuk masyarakat secara terbuka, dengan tujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mengenal Program KB secara menyeluruh. Fasilitas yang disediakan PPKS KASIH adalah:
 - (1) Data dan Informasi Program KB;
 - (2) Layanan Konsultasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
 - (3) Klinik Pelayanan KB;
 - (4) Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR dan BKL);
 - (5) Stand produk unggulan Kelompok UPPKS;

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program/kegiatan yang paling menunjukkan output paling mendukung dalam pencapaian kinerja organisasi adalah “Program Keluarga Berencana”, dimana program tersebut merupakan mampu memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana.

Namun perlu juga dipahami, bahwa sasaran dari setiap program/kegiatan yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebuah sistem, dimana antara program/kegiatan yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Terjadinya keberhasilan salah satu sasaran, akan mempengaruhi keberhasilan sasaran yang lain. Sebaliknya, jika terjadinya kegagalan salah satu sasaran akan berdampak pada kegagalan dari sasaran yang lain. Keberhasilan dari rangkaian sistem yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, nantinya secara menyeluruh akan bermuara pada keberhasilan dalam mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, khususnya di Kabupaten Toba.

Dibawah ini disajikan data table mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang terdapat pada table 2.2.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)		(13)
1	Indeks Ketahanan Keluarga	-	-	0,65	0,66	0,67	0,68	55%	0,66	0,67	0,68	
2	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	-	-	31,00	33,00	35,00	37,00	2,80%	33,00	35,00	37,00	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-	-	0,60	0,59	0,58	0,57	1,20%	0,59	0,58	0,57	
4	TFR (Total Fertility Rate)	-	-	3,58	3,57	3,56	3,55	2,52%	3,57	3,56	3,55	
5	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan	-	-	92,30	96,15	100,00	100,00	87,50%	96,15	100,00	100,00	
6	Persentase Peserta KB Aktif	-	-	77,50	77,55	77,60	77,65	77'83%	77,55	77,60	77,65	
7	Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	-	-	18,95	19,00	19,05	19,10	18,34%	19,00	19,05	19,10	
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	-	-	12,00	11,90	11,80	11,70	12,00%	11,90	11,80	11,70	
9	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	-	-	0,28	0,27	0,26	0,25	1	0,27	0,26	0,25	
10	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	-	-	29,05	29,00	28,95	28,90	25%	29,00	28,95	28,90	
11	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	-	-	55,00	56,00	57,00	58,00	62%	56,00	57,00	58,00	
12	Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	-	-	55,00	57,00	59,00	61,00	45%	57,00	59,00	61,00	
13	Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	-	-	44,00	46,00	48,00	50,00	28%	46,00	48,00	50,00	
14	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	-	-	62,00	64,00	66,00	68,00	52%	64,00	66,00	68,00	
15	Persentase Kelompok PIK R/M	-	-	100	100	100	100	34%	100	100	100	
16	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	-	-	24	24	24	24	26	24	24	24	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

A. Permasalahan dan Hambatan

Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah birokrasi:
 - a. Koordinasi antar lembaga masih lemah;
 - b. Tupoksi dengan beberapa perangkat daerah *over lapping*/tumpang tindih.
2. Masalah Manajemen KB dan Kualitas Pelayanan KB;
 - a. Tidak digantinya tenaga Penyuluh KB yang pensiun, sehingga ratio PLKB/Desa adalah 1:9;
3. Masalah kebijakan dan tradisi:
 - a. Aspek kependudukan belum menjadi prioritas utama, sehingga sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah dalam bentuk Perda maupun Perbup tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba;
 - b. Tradisi adat Batak, dimana generasi penerus marga adalah laki-laki, sehingga keluarga yang belum mempunyai anak laki-laki akan terus melakukan reproduksi tanpa mempertimbangkan kesehatan reproduksi dan kemampuannya dalam pembangunan keluarga yang berkualitas selain itu ada semboyan “Banyak Anka, Banyak Rezeki” pola pikir tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang masih enggan dalam hal ber-KB.

B. Dampak Permasalahan

Melalui pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi dan hambatan pelaksanaan setiap program/kegiatan tidak dapat tercapai secara maksimal, hal tersebut akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba yaitu “Terwujudnya Kabupaten Toba yang Unggul dan Bersinar”, dan juga SDGs sesuai Perpres 59 Tahun 2017 untuk Tujuan 3 mengenai Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Dimana untuk target 2030 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan dan integritas kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional dengan 4 indikator yang juga harus diperhatikan seperti :

- a. Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
- b. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
- c. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun atau *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR)
- d. *Total Fertility Rate* (TFR)

Permasalahan yang sudah diuraikan diatas akan berdampak buruk pada visi dan misi serta pengerjaan target SDGs yang telah ditetapkan. Masalah Birokrasi, Manajemen KB, dan Tradisi masyarakat kita akan memperlambat pengerjaan Visi dan Misi serta SDGs. Program KB yang sudah direncanakan untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk seharusnya mampu dilaksanakan melalui Program/Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran yang diberikan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal disusun tentang rencana pencapaian target dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam hal penyediaan bahan bacaan serta kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal penyelamatan atau pengamanan arsip penting daerah.

Rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah tertuang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan yang bersumber dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029. Namun hal itu masih perlu dianalisa agar penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dapat dihitung secara proporsional dan tepat sasaran sesuai dengan diharapkan.

Dalam rancangan awal disajikan tentang program dan kegiatan yang dapat mendukung target dan indikator kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2025 – 2029 dengan jumlah usulan dana sebesar Rp. 6.967.410.910,00 (*enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) dengan rincian 4 program, 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setelah direview rancangan awal seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan layak untuk diajukan. Berdasarkan hasil review tersebut diketahui bahwa Program yang diusulkan ada sebanyak 4 program dengan jumlah 15 kegiatan serta 46 sub kegaitan dengan kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp.

6.967.410.910,00 (*Enam Miliyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*) terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pengendalian Penduduk	Kab. Toba	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	3,57%	49.612.500	Program Pengendalian Penduduk	Kab. Toba	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS	3,58%	231.000.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Toba	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	26,00%	47.250.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Toba	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	26,00%	47.250.000	
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DPPKB	Dokumen GDPK 5 Pilar yang tersusun	1 dok	-	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DPPKB	Dokumen GDPK 5 Pilar yang tersusun	1 dok	-	
2	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kab. Toba	Sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	3 sekolah	47.250.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan	Kab. Toba	Sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	3 sekolah	47.250.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100%	183.750.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100%	183.750.000	
3	Penyediaan Data dan Infomasi Keuarga	Kab. Toba	Data Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	1 buku	47.250.000	Penyediaan Data dan Infomasi Keuarga	Kab. Toba	Data Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga	1 buku	47.250.000	
4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Toba	Laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB		84.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Toba	Laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB		84.000.000	
5	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Toba	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	30 persen	52.500.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Toba	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	30 persen	52.500.000	
II	Program Keluarga Berencana	Kab. Toba	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12.10%	2.335.000.000	Program Keluarga Berencana	Kab. Toba	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet	12.10%	2.335.000.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Toba	Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmeet need	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	258.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Toba	Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmeet need	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	258.000.000	
6	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Pogram KKBPK	Kab. Toba	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	16 kecamatan	88.000.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Pogram KKBPK	Kab. Toba	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	16 kecamatan	88.000.000	
7	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Toba	Pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana	16 kecamatan	120.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Toba	Pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana	16 kecamatan	120.000.000	
8	Pengelolaan Opsional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Toba	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB	0 balai	50.000.000	Pengelolaan Opsional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Toba	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB	0 balai	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Toba	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	61,00%	520.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Toba	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	61,00%	520.000.000	
9	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Toba	Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB	1 jenis	-	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Toba	Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB	1 jenis	-	
10	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Toba	Persentase Penyuluh KB / PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	65 persen	230.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Toba	Persentase Penyuluh KB / PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	65 persen	230.000.000	
11	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Toba	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan	100 persen	290.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Toba	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /	100 persen	290.000.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	70,00%	1.255.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	70,00%	1.255.000.000	
12	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Toba	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	100 persen	82.500.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Kab. Toba	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	100 persen	82.500.000	
13	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Toba	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	76 persen	455.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Toba	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	76 persen	455.000.000	
14	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Toba	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB	0 jenis	-	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Toba	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB	0 jenis	-	
15	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Toba	Pesertan Peserta KB Aktif	77.45 persen	82.500.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Toba	Pesertan Peserta KB Aktif	77.45 persen	82.500.000	
16	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di	Kab. Toba	PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi	1000 orang	105.000.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak	Kab. Toba	PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi	1000 orang	105.000.000	
17	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Kab. Toba	Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	0 orang	200.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan	Kab. Toba	Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi	0 orang	200.000.000	
18	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Toba	Pelayanan KB dan KR Bergerak / Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus	4 gerak	330.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Toba	Pelayanan KB dan KR Bergerak / Bakti Sosial di wilayah dan sasaran	4 gerak	330.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat	Kab. Toba	Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB	5 MoU/PKS	302.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Kab. Toba	Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB	5 MoU/PKS	302.000.000	
19	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Toba	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB-Kes, IBI-KB-Kes, TNI-KB-Kes)	450 akseptor	137.000.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Toba	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB-Kes, IBI-KB-Kes, TNI-KB-	450 akseptor	137.000.000	
20	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Toba	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	55 persen	165.000.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Toba	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	55 persen	165.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kab. Toba	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29.10%	780.000.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kab. Toba	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejah	29.10%	780.000.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Toba	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	15,00 persen	615.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kab. Toba	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	15,00 persen	615.000.000	
21	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba	Sarana dan Prasana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	5 jenis	65.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba	Sarana dan Prasana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	5 jenis	65.000.000	
22	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang dilatih dan diorientasi	384 kader	220.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang dilatih dan diorientasi	384 kader	220.000.000	
23	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	640 orang	165.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Toba	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	640 orang	165.000.000	
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Toba	Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan	105 kelompok	165.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Kab. Toba	Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan	105 kelompok	165.000.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat	Kab. Toba	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	20,00 persen	165.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	Kab. Toba	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	20,00 persen	165.000.000	
25	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba	kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga	18 kelompok	165.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Toba	kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga	18 kelompok	165.000.000	
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba	Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.621.410.910	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba	Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.621.410.910	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toba	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	8%	45.675.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toba	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	8%	45.675.000	
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKB	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	31.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKB	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	31.500.000	
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	10 laporan	14.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	10 laporan	14.175.000	
	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN	100%	2.404.500.000	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN	100%	2.404.500.000	
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKB	Gaji dan Tunjangan PNS	25 orang	2.399.250.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKB	Gaji dan Tunjangan PNS	25 orang	2.399.250.000	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKB	Laporan keuangan akhir tahun	10 laporan	5.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKB	Laporan keuangan akhir tahun	10 laporan	5.250.000	
	Adminstrasi Kepegawaian	Kab. Toba	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	88,37%	143.079.600	Adminstrasi Kepegawaian	Kab. Toba	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	88,37%	143.079.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKB	Pengadaan pakaian dinas	0 unit	23.079.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKB	Pengadaan pakaian dinas	0 unit	23.079.600	
31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	0 orang	120.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	0 orang	120.000.000	
	Adminstrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba	Frekuensi pelayanan administrasi kantor	22 jenis	326.191.455	Adminstrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba	Frekuensi pelayanan administrasi kantor	22 jenis	326.191.455	
32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	3.129.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan	20 jenis	3.129.000	
33	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 jenis	83.475.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 jenis	83.475.000	
34	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKB	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	10 jenis	21.335.160	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKB	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	10 jenis	21.335.160	
35	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKB	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Bulanan	540 kotak	28.350.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKB	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	540 kotak	28.350.000	
36	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKB	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 jenis	7.702.307	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKB	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 jenis	7.702.307	
37	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPKB	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan	3 jenis	5.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPKB	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan	3 jenis	5.250.000	
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKB	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	120 orang	176.949.988	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKB	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	120 orang	176.949.988	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toba	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	350.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toba	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	350.000.000	
39	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKB	Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan	0 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKB	Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan	0 unit	300.000.000	
40	Pengadaan Mebel	DPPKB	Pengadaan Mebel	0 jenis	50.000.000	Pengadaan Mebel	DPPKB	Pengadaan Mebel	0 jenis	50.000.000	
41	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKB	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKB	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 unit	-	
42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPKB	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 jenis	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	DPPKB	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 jenis	-	
	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toba	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	12 bulan	175.011.855	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toba	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	12 bulan	175.011.855	
43	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	Pembayaran rekening listrik dan internet	2 jenis	23.011.855	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	Pembayaran rekening listrik dan internet	2 jenis	23.011.855	
44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKB	Tenaga Kontrak/Honoror dan Pengelola Keuangan OPD	17 orang	152.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKB	Tenaga Kontrak/Honoror dan Pengelola Keuangan OPD	17 orang	152.000.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toba	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	176.953.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kab. Toba	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	176.953.000	
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKB	Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun	50 unit	161.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKB	Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun	50 unit	161.280.000	
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKB	Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara	10 jenis	15.673.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKB	Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara	10 jenis	15.673.000	
J U M L A H					6.786.023.410	J U M L A H					
						6.967.410.910					

**2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT**

Usulan Program dan Kegiatan masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2025 – 2029. Selain usulan program berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun tersebut ada juga usulan yang bersumber dari masyarakat melalui kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Toba ke Kecamatan maupun melalui Usulan Musrenbang.

Namun program dan kegiatan serta anggaran yang telah disusun ini seluruhnya bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Forum Reses Anggota DPRD Kabupaten Toba yang dilakukan ke kecamatan dan Usulan melalui Musrenbang Desa / Kecamatan / Kabupaten tidak ada seperti terlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu “Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut akan berhubungan langsung dengan arah kebijakan nasional pemerintah. Melalui kebijakan Nasional diharapkan akan membantu Indonesia mencapai Visi yang telah dirancang.

Arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045 selalu memperhatikan stabilitas bangsa dan negara, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin serta Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui tiga hal tersebut diperlukan strategi besar untuk mencapai Indonesia Emas sesuai dengan arahan Presiden. RPJMN ini disusun untuk kemudian ditelaah dan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait sampai pada penyusunan Rencana Kerja tahunan yang menggambarkan program dan kegiatan yang lebih rinci dan terarah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 perangkat daerah juga berpedoman terhadap Renstra masing-masing perangkat daerah. Melalui kondisi di atas di bawah ini disajikan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif,
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup,
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global,
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi,
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Yang menjadi Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya TFR dapat mencapai 2,54 pada Tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 2,5 pada tahun 2026,
2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 18,95 % pada Tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 19,10 % pada tahun 2026,
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 12,00 % pada Tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 11,70 % pada tahun 2026,
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target 1/1000 kelahiran pada Tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 1/1000 kelahiran pada tahun 2026,

Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- Pengembangan GDPK lima pilar untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah,
- Penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk,
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk,
- Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat), yang dapat terwujud melalui strategi:

- Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KB-PP),
- Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan kemitraan,
- Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan

dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need, miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting),

- Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator/kelompok KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten dan kota,
- Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan 4 (empat) terlalu kepada keluarga, PUS dan remaja,
- Peningkatan kemandirian Pasangan Usia Subur dalam ber-KB.

3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi:

- Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK),
- Peningkatan kualitas/ketahanan remaja (Kelompok Usia Produktif) dan Penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja,
- Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang terstandarisasi dan pengembangan sistem rujukan yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah,
- Pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga,

- Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia.
4. **Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program KKBPK sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah**, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan advokasi Program KKBPK berbasis biaya dan manfaat serta pendekatan sosial kultural,
 - Peningkatan promosi Program KKBPK (Bangga Kencana) berdasarkan orientasi sasaran berbasis karakteristik wilayah,
 - Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBPK dan penyebaran materi/informasi terkini.
5. **Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi**, dengan strategi:
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah,
 - Pengembangan *smart technology* untuk memperkuat pengelolaan Program KKBPK.

Untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah menetapkan 4 (empat) program pokok adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk;

- Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK serta menyediakan basis data kependudukan, data keluarga, data pembangunan keluarga dan data induvidu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

- meningkatkan kualitas pelayanan KB dan menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara terjangkau Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) tersebut pelaksanaannya didanai oleh APBD Kabupaten Toba Samosir dan anggaran dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;
- Pelayanan KB bagi keluarga miskin dilaksanakan di puskesmas-puskesmas secara terpusat setiap 1 (satu) bulan sekali di setiap Kecamatan. Pelayanan KB juga dilaksanakan pada momentum khusus seperti Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia, TNI KB Terpadu, Hari Jadi Kabupaten Toba Samosir serta Kesatuan Gerak PKK KB Kes. Pelayanan Medis Operasi Pria dan Wanita telah dilakukan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;
- meningkatkan kualitas dan keikutsertaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) meliputi PPKBD/Sub PPKBD dalam program Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

- bertujuan meningkatkan usia perkawinan remaja, menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun/age specific fertility rate (ASFR) yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan di Pelatihan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja bagi remaja sekolah dan masyarakat sebanyak 240 orang, lomba Kelompok PIK remaja yang diikuti oleh 16 kelompok PIK Remaja yang ada di Masyarakat, pemilihan duta remaja dan

duta mahasiswa tingkat Kabupaten Toba yang diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan remaja;

- mencegah / menurunkan stunting bagi para calon pengantin melalui penyuluhan dan pembinaan kepada calon pengantin dan para ibu usia muda.
- meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Yang menjadi Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba “TOBA MANTAP 2029”

dengan Visi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak;
2. Membangun Infrastruktur yang terintegrasi berkualitas dan merata;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat;
5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban;
6. Melestarikan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Berkualitas melalui Pengendalian Kelahiran Penduduk.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil review atas usulan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026, ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba pada Tahun 2026 akan melaksanakan 4 Program, 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
 - 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal.
 - 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
 - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

- c. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
 - b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
 - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
 - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

- b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
 - e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - f. Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
 - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a. Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
 - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
 - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat,

Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

- 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Adminstrasi Kepegawaian
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Adminstrasi umum perangkat daerah
 - a. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Barang cetakan dan penggandaan
 - f. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada seluruh desa / kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Toba terutama pada desa / kelurahan atau

kecamatan yang memiliki faskes. Besaran biaya dan pagu indikatif yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 6.967.410.10,00 (*enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

- a. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Rumusan program dan kegiatan seperti tersebut akan dijabarkan pada tabel T.C 33 di Bab IV yang merupakan rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Rumusan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. Hal ini dilakukan agar rumusannya sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Pendanaan untuk Penurunan Stunting

Begitu pentingnya penanganan masalah stunting ini, maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden ini, terdapat 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Penurunan Stunting, yaitu :

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan dikementerian / lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Dari ke 5 (lima) pilar tersebut, kita baru memasuki pilar pertama yaitu peningkatan komitmen kita bersama dalam mempercepat penurunan stunting. Itulah yang menjadi dasar mengapa rapat koordinasi ini menjadi penting kita laksanakan, karena sejak dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toba tahun 2022, menjadi tanggung jawab kita untuk bersama-sama mewujudkan komitmen terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paser.

Merujuk Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, maka intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yaitu:

- Aksi 1 : Analisis Situasi Program Penurunan Stunting, perangkat daerah penanggung jawab Bappedalitbang dan Perangkat Daerah
- Aksi 2 : Penyusunan Rencana Kegiatan, perangkat daerah penanggung jawab adalah Bappedalitbang dan Perangkat Daerah
- Aksi 3 : Rembuk Stunting, perangkat daerah penanggung jawab adalah Bappedalitbang dan.atau Sekretariat Daerah
- Aksi 4 : Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Aksi 5 : Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, perangkat daerah penanggung jawan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Aksi 6 : Sistem Manajemen Data Stunting, perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan, Dinas PPKBPPPA, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Data Stunting perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan
- Aksi 8 : Reviu Kinerja Tahunan, perangkat daerah penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah dan Bappedalitbang.

Untuk memastikan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan Aksi Integrasi tersebut, diperlukan rapat-rapat koordinasi sebagai wahana untuk melaporkan kemajuan tindak lanjut sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat dalam setiap aksi tersebut. Berdasarkan pelaksanaan dari ke lima aksi tersebut perlu didukung adanya dana sehingga akan menghasilkan Lokus Fokus Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi dan memetakan program dan kegiatan yang tersedia pada perangkat daerah untuk intervensi penurunan stunting. Adapun dibawah ini disajikan tabel 3.3 rencana kerja dan pendanaan

Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/bulan	2.543.446.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN		2.600.000.000,00
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN		6.000.000,00
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi</i>		93,02 persen	80.000.000,00		Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	97,47 persen	90.000.000,00
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi		90.000.000,00
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Frekuensi pelayanan administrasi kantor</i>		12,00 Bulan	352.981.140,00		Frekuensi pelayanan administrasi kantor	12,00 Bulan	365.000.000,00
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuensi pelayanan administrasi kantor		4.000.000,00
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuensi pelayanan administrasi kantor		90.000.000,00
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.981.140,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuensi pelayanan administrasi kantor		10.000.000,00
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuensi pelayanan administrasi kantor		8.000.000,00
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuenasi pelayanan administrasi kantor		3.000.000,00
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuenasi pelayanan administrasi kantor		250.000.000,00
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	140.000.000,00		Terpeliharanya barang milik daerah	-	140.000.000,00
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terpeliharanya barang milik daerah		100.000.000,00
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terpeliharanya barang milik daerah		40.000.000,00
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi penyediaan jasa penunjang		12,00 Bulan	274.000.000,00		Frekuenasi penyediaan jasa penunjang	12,00 Bulan	275.000.000,00
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuenasi penyediaan jasa penunjang		25.000.000,00
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Frekuenasi penyediaan jasa penunjang		250.000.000,00
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100,00 persen	276.000.000,00		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	287.000.000,00
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100.000.000,00
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Unit	160.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		170.000.000,00
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		17.000.000,00
2,	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.</i>		3,57 Rata-rata Anak per Wanita	203.962.500,00			3,55 Rata-rata Anak per Wanita	214.160.625,00
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk</i>		27,00 persen	49.612.500,00		anak sekolah	29,00 persen	52.093.125,00
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Satuan Pendidikan	49.612.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	anak sekolah		52.093.125,00
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa</i>		100,00 persen	154.350.000,00		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	100,00 persen	162.067.500,00
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga								
			<i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	82.687.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa		86.821.875,00

	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	22.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa		23.152.500,00
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain								
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	49.612.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa		52.093.125,00
3,	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)		11,8 Persen	1.384.100.000,00			11,7 Persen	1.510.360.000,00
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need		80 (16 kec & 146/Desa/Kel) persen	193.250.000,00		Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need	100 (16 kec & 146/Desa/ Kel) persen	212.575.000,00
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana								
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need		55.000.000
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Laporan	52.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need		57.750.000
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								

[illegible]

[illegible]

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		40.000.000,00
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak								
			<i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		70.000.000,00
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan								
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		60.000.000,00
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Mou/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di DPPKB</i>		7 kegiatan	135.000.000,00		Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB	10 kegiatan	145.000.000,00
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Organisasi	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB		100.000.000,00
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB		45.000.000,00
4,	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	<i>Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I</i>		29 Persen	360.000.000,00			28,9 Persen	410.000.000,00

	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga</i>		17,00 persen	310.000.000,00		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	21,00 persen	350.000.000,00
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		90.000.000,00
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		90.000.000,00
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		70.000.000,00
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
			<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan</i>	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		100.000.000,00

	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri		63.00 persen	50.000.000,00		Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	68.00 persen	60.000.000,00
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Organisasi	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri		60.000.000,00
	J U M L A H					5.659.489.720,00				5.952.520.625,00

Balige, April 2025

KEPALA DPPKB
KABUPATEN TOBA

dr. Julwan Hutapea
Pembina Utama Muda
NIP. 19710701 200112 1 001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TOBA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						8.534.353.000,00						11.087.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.723.006.096,00							8.168.000.000,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.723.006.096,00							8.168.000.000,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	640.318.706,00						-	758.000.000,00	
		[Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	81.00	67.00	73.40	75.30	640.318.706,00	-	-	-	-	-	-	758.000.000,00	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan peran penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	22.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	-	-	6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	-		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	295.318.706,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	321.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	81.00	67.00	73.40	75.30	640.318.706,00	-	-	-	-	-	-	758.000.000,00	-
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	86.318.706,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memper kuat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memper kuat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				12 0	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	640.318.706,00	-	-	-	-	-	-	758.000.000,00	-
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	-	-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	81.00	67.00	73.40	75.30	640.318.706,00	-	-	-	-	-	-	758.000.000,00	-
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.000.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		162.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Barang Milik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	640.318.706,00	-	-	-	-	-	-	758.000.000,00	-
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	17.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Barang Milik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	350.787.390,00						-	625.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	-			29,00 persen	107.787.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				1 Satuan Pendidikan	57.787.390,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.27	2.54	2.50	2.44	350.787.390,00	-	-	-	-	-	-	625.000.000,00	-
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	243.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	455.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penangan masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	350.787.390,00	-	-	-	-	-	-	625.000.000,00	-
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	76.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penangan masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk]	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.27	2.54	2.50	2.44	350.787.390,00	-	-	-	-	-	-	625.000.000,00	-
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	92.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	350.787.390,00	-	-	-	-	-	-	625.000.000,00	-
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				17 Unit	20.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	2.901.400.000,00						-	4.441.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pembinaan keluarga berencana]	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15	27	25	23	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	670.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba	-	1.230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pembinaan keluarga berencana]	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15	27	25	23	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Masyarakat Kabupaten Toba		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	902.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	PKB/PLKB	-	1.226.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	55.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	PKB/PLKB		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	PKB/PLKB		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.017.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	-	1.520.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	67.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				150 Orang	700.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya		905.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				16 Unit	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya		270.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pembinaan keluarga berencana]	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15	27	25	23	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				75 Orang	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				75 Orang	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan masalah kesehatan keajahteraan sosial.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pembinaan keluarga berencana]	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15	27	25	23	2.901.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.441.000.000,00	-
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	312.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan masalah kesehatan keajahteraan sosial.	Organisasi Kemasyarakatan	-	465.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial.	Organisasi Kemasyarakatan		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Kampung	162.400.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial.	Organisasi Kemasyarakatan		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	1.830.500.000,00						-	2.344.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera]	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	36.83 64	36.46 58.65	36.51 59	36.53 60	1.830.500.000,00	-	-	-	-	-	-	2.344.000.000,00	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	380.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya terhadap masalah kesejahteraan sosial.	Kader Poktan, PPKS dan UPPKA	-	679.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	67.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya terhadap masalah kesejahteraan sosial.	Kader Poktan, PPKS dan UPPKA		69.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10 Laporan	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Kader Poktan, PPKS dan UPPKA		190.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	130.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganannya masalah kesejahteraan sosial.	Kader Poktan, PPKS dan UPPKA		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.811.346.904,00						-	2.919.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	2.811.346.904,00	-	-	-	-	-	-	2.919.000.000,00	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.801.346.904,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penyangandang masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh ASN di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Toba	-	2.900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.801.346.904,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penyangandang masalah kesejahteraan sosial.	Seluruh ASN di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Toba		2.900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Barang Milik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	Barang Milik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							8.534.353.000,00							11.087.000.000,00	

BAB V

P E N U T U P

RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2026. menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 2025

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

dr. JULI WAN HUTAPEA
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19710701 200112 1 001

